

PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN PERIODE 2013-2018 DAN TARGET DALAM RAPBN 2019

Jesly Yuriaty Panjaitan S.E., M.M.
Hikmatul Fitri S.E., M. Sc.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan paling besar, menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan yang berasal dari bea masuk dan pajak ekspor.

JENIS PAJAK

Ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak, pajak dapat dibagi dua jenis, yaitu:

- Pajak Negara, sering disebut juga sebagai pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.
- Pajak Daerah, sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah terdiri dari :
 - Pajak Provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
 - Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

KEBIJAKAN DAN TARGET PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2019

Kontribusi penerimaan perpajakan sebagai pendapatan negara utama ditargetkan meningkat yaitu 83,1% dalam RAPBN 2019. Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp1.780.995,9 miliar atau naik sebesar 15,0% dibandingkan dengan *outlook* 2018 (tabel 1). Berikut kebijakan umum yang dalam mencapai target penerimaan perpajakan di tahun 2019:

Tabel 1 Kebijakan Umum Perpajakan Tahun 2019

No	Kebijakan yang Akan Ditempuh
1	Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi
2	Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (<i>sustainable compliance</i>)

3	Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri
4	Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif
5	Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i> ;
6	Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan <i>inequality</i>

Sumber: RAPBN 2019

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, pemerintah juga mengambil langkah yang bersifat teknis. Kebijakan teknis dibidang perpajakan diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target perpajakan tahun 2019. Tabel 2 berikut menunjukkan kebijakan teknis perpajakan tahun 2019.

Tabel 2 Kebijakan Teknis Perpajakan Tahun 2019

No	Kebijakan yang Akan Ditempuh
1	Penguatan fungsi pelayanan (<i>tax service</i>) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela
2	Peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajin Pajak antara lain melalui implementasi <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i>
3	Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca program <i>tax amnesty</i>
4	Peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end, antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan <i>Business Development Services (BDS)</i>
5	Pelaksanaan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) secara berkeadilan
6	Melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, teknologi informasi, maupun penyempurnaan bisnis

Sumber: Nota Keuangan & RAPBN 2019

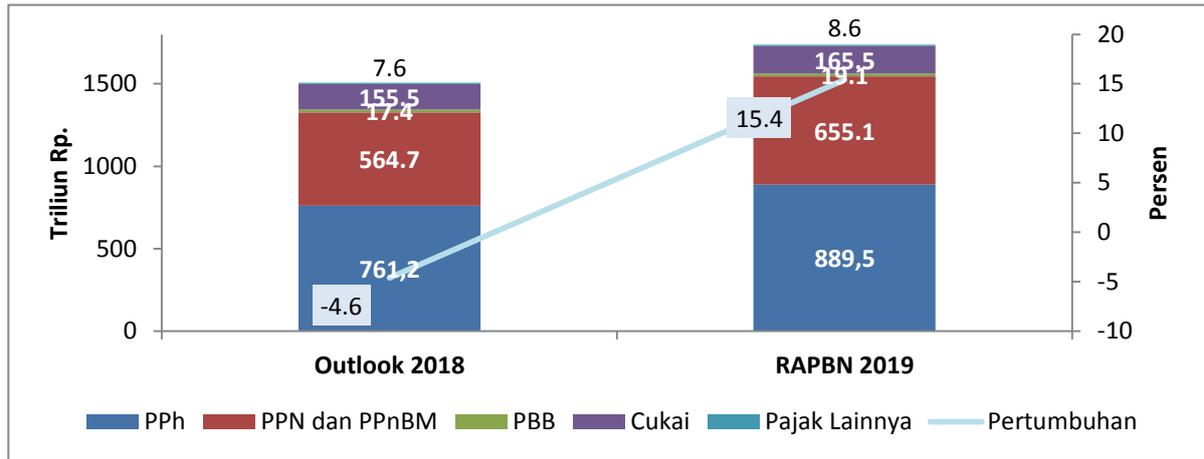
Pada tahun 2019 pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan berusaha di bidang perpajakan kepada sektor informasi khususnya pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang difokuskan pada perluasan program pembinaan usaha Wajib Pajak yaitu *Business Development Services (BDS)*.

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN, dan PPnBM, Cukai dan pajak lainnya. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Target pendapatan pajak dalam negeri dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp1.737830,9 miliar atau meningkat sebesar 15,4% jika dibandingkan dengan *outlook* 2018 peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan proyeksi kinerja perekonomian dalam negeri (gambar 1). Sedangkan dari sisi harga komoditas, walaupun diproyeksikan cenderung stabil atau stagnan, tetapi masih akan berpotensi mengalami perbaikan sehingga berdampak positif terhadap proyeksi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2019.

Gambar 1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri Tahun 2018-2019

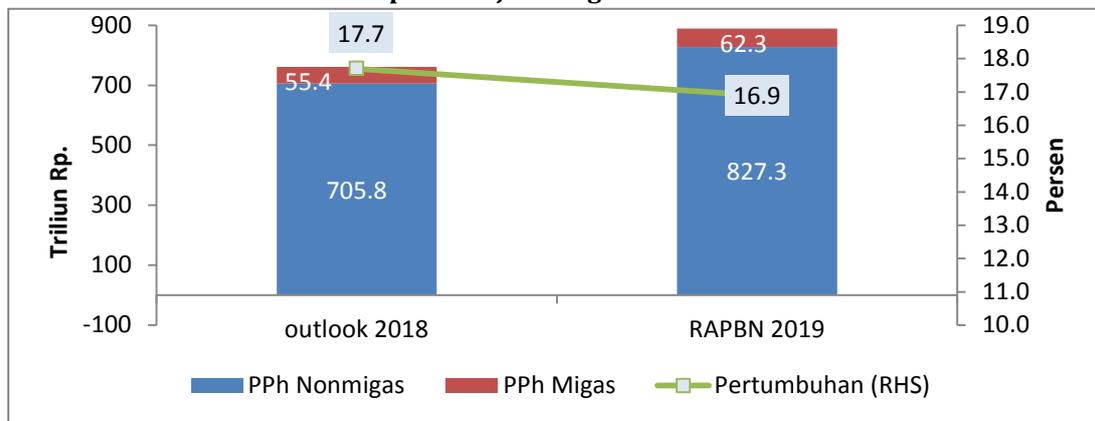


Sumber: Kementerian Keuangan, RAPBN 2019

a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam RAPBN 2019 PPh yang terdiri dari PPh Migas dan PPh Nonmigas ditargetkan sebesar Rp889.544,4 miliar atau meningkat sebesar 16,9% jika dibandingkan *outlook* 2018 (gambar 2). Kenaikan target pendapatan PPh dalam RAPBN 2019 berasal dari PPh Nonmigas di mana dalam RAPBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp827.260,0 miliar atau mengalami kenaikan 17,2% dibandingkan *outlook* 2018.

Gambar 2 Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2018-2019

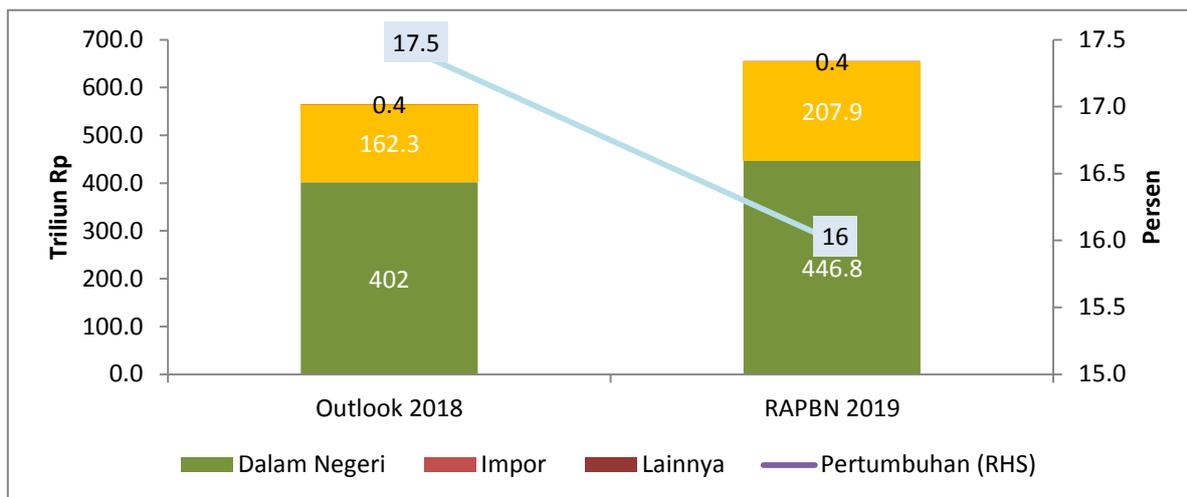


Sumber: Kementerian Keuangan, NK dan RAPBN 2019

b. Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN 2019 ditargetkan sebesar Rp655.060,0 miliar atau meningkat sebesar 16,0% dari target dalam *outlook* 2018. Pada gambar 3 menunjukkan target PPN dan PPnBM tahun 2019 terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp446.773,1 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp207.935,8 miliar, serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp351,1 miliar.

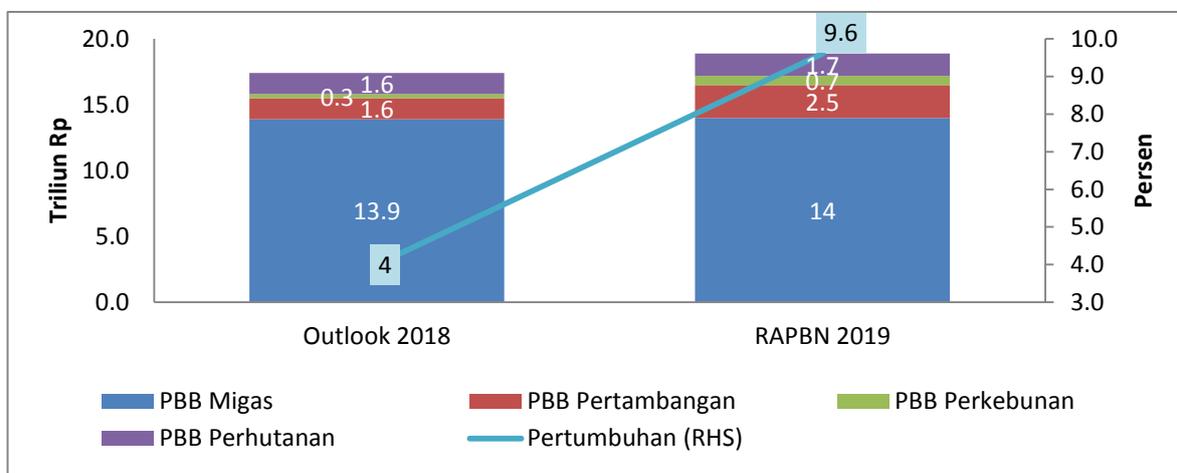
Gambar 3 Pendapatan PPn dan PPnBM Tahun 2018-2019



Sumber: Kementerian Keuangan, NK dan RAPBN 2019

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan PBB dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp19.106,0 miliar atau meningkat 9,6% dari *outlook* 2018 (gambar 4). Peningkatan pendapatan PBB tersebut terutama berasal dari PBB sektor migas dan pertambangan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

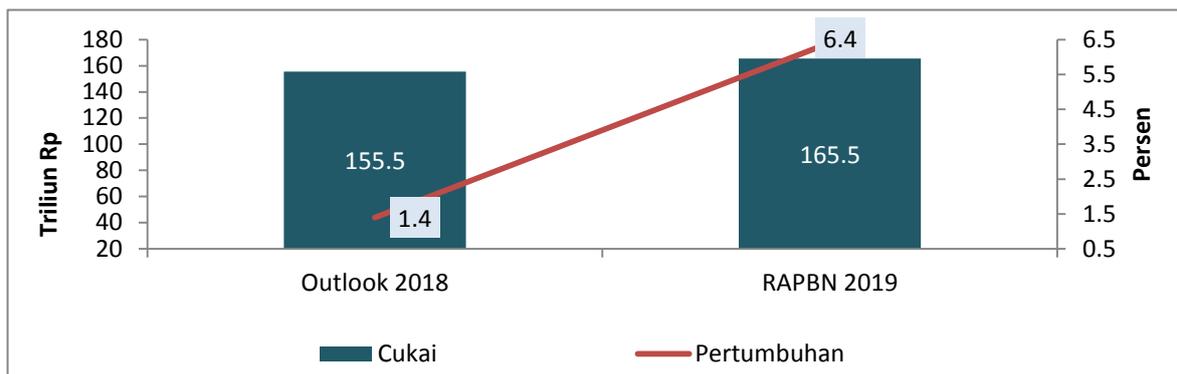


Gambar 4 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2019

Sumber: Kementerian Keunagan, NK dan RAPBN 2019

d. Pendapatan Cukai

Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp165.501,0 miliar, terdiri dari cukai hasil tembakau (HT), cukai etil alkohol (EA), cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Dalam gambar 5 menunjukkan pendapatan cukai dalam RAPBN 2019 naik 6,4% dibandingkan target dalam *outlook* 2018.



Gambar 5 Pendapatan Cukai Tahun 2018-2019

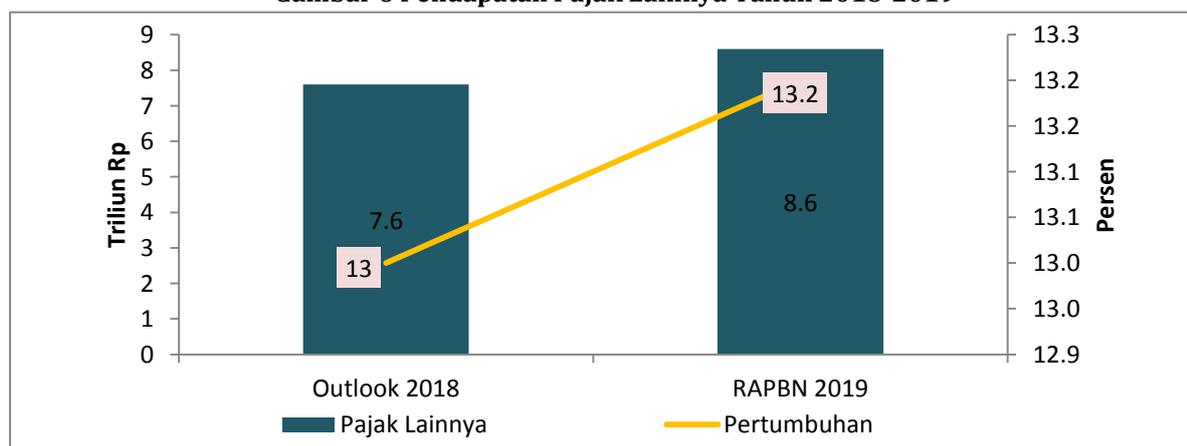
Sumber: Kementerian Keuangan, NK dan RAPBN 2019

Hal-hal yang menyebabkan naiknya target pendapatan cukai antara lain adanya penyesuaian naik tarif cukai hasil tembakau, dilanjutkannya program penertiban rokok ilegal dan adanya rencana penambahan barang kena cukai (BKC) baru berupa kemasan/kantong plastik.

e. Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya terutama berasal dari pendapatan bea materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan penagihan pajak. Pendapatan pajak lainnya dalam RAPBN 2019 ditargetkan mencapai Rp8.619,5 miliar, atau meningkat 13,2% dibandingkan *outlook* 2018 yang terlihat pada gambar 6. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan atau harus menggunakan bea materai.

Gambar 6 Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2018-2019



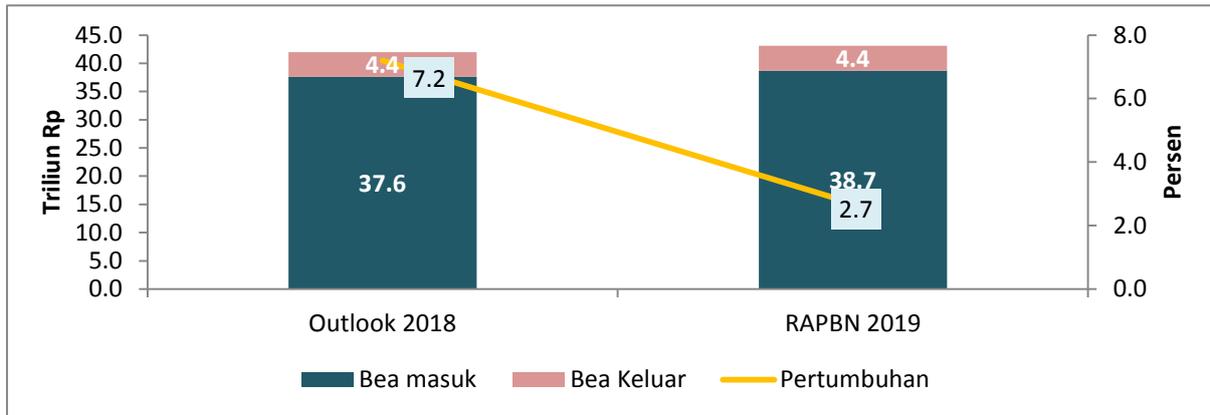
Sumber: Kementerian Keuangan, NK dan RAPBN 2019

2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, pada RAPBN 2019 ditargetkan sebesar Rp43.165,0 miliar atau meningkat 2,7% dari target *outlook* 2018. Pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp38.745,0 miliar atau meningkat 3,0% dibandingkan dengan target dalam

outlook 2018. Sementara pendapatan bea keluar diproyeksikan sebesar Rp4.420,0 triliun atau turun 0,6% dibandingkan outlook 2018.

Gambar 7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2018-2019



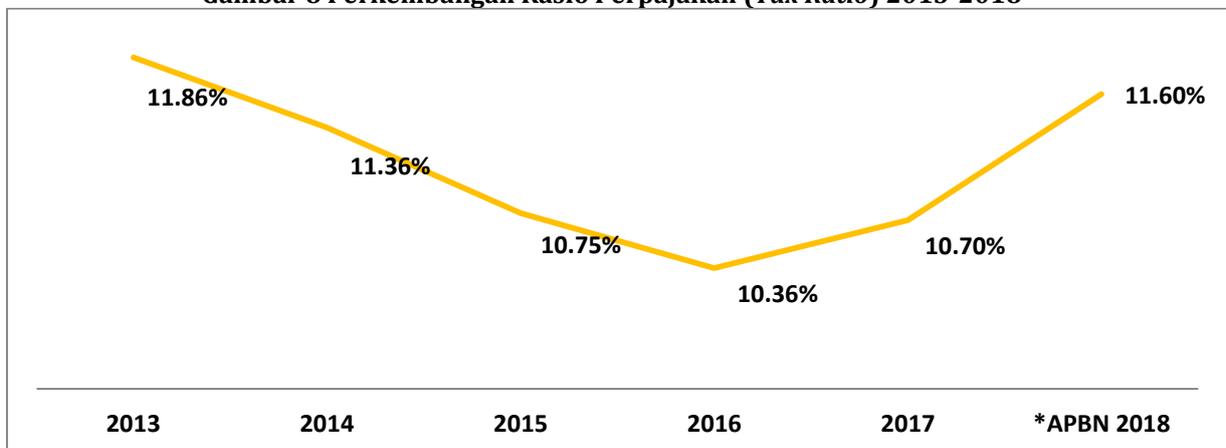
Sumber: Kementerian Keuangan, NK dan RAPBN 2019

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PERIODE 2013 – 2018

Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2014-2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.548,5 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.54,8 triliun. Penurunan terjadi pada penerimaan PPh Nonmigas, sebagai dampak dari penyesuaian basis perhitungan PPh Nonmigas berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

Meskipun perkembangan penerimaan pajak terus meningkat dalam periode 2013-2017, *tax ratio* Indonesia cenderung stabil dalam periode yang sama (gambar 8). Pemerintah berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB antara lain melalui reformasi perpajakan, agar dapat leluasa meningkatkan *fiscal space* untuk meningkatkan belanja negara yang produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif.

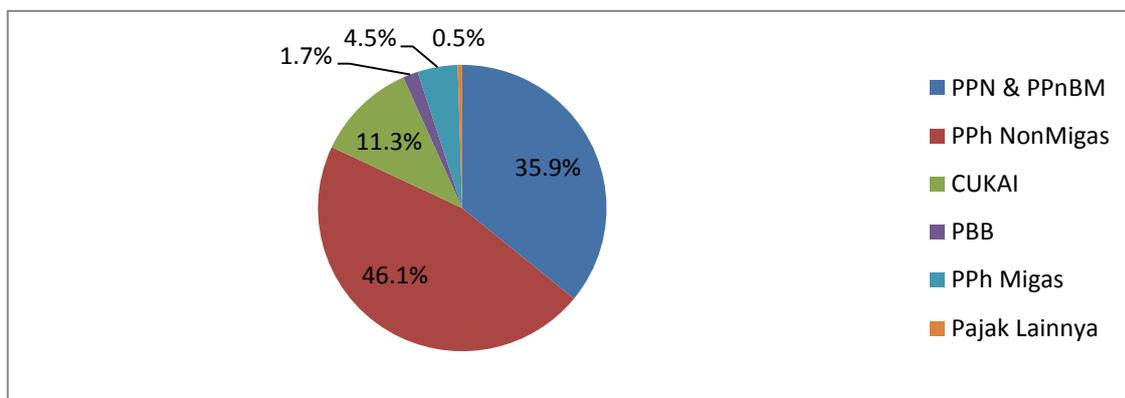
Gambar 8 Perkembangan Rasio Perpajakan (Tax Ratio) 2013-2018



Sumber: Kementerian Keuangan, RAPBN 2019

Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri meningkat dari 74,0% pada tahun 2014, menjadi 80,6% pada tahun 2018. Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh Nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 46,1% terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya, dalam gambar 9 menunjukkan pendapatan dari PPN dan PPnBM memberi kontribusi rata-rata 35,9%, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh Nonmigas meningkat rata-rata 11,5% per tahun selama periode 2014-2018. Sementara pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,3%, tumbuh rata-rata 7,8% per tahun selama periode yang sama.

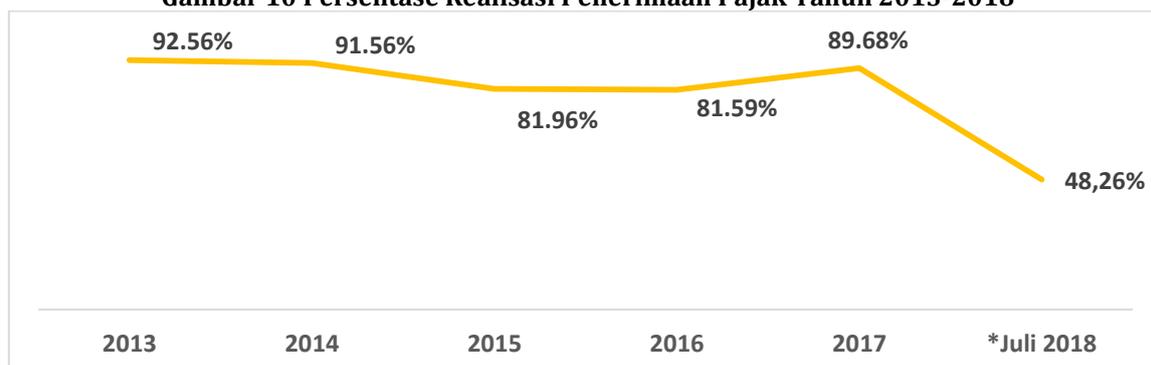
Gambar 9 Kontribusi Rata-rata Terhadap Pendapatan Dalam Negeri 2014-2018



Sumber: NK dan RAPBN 2019

Dalam RAPBN 2019, penerimaan pajak dalam negeri diproyeksikan sebesar Rp1.737,8 triliun, atau sebesar 15,36% dari *outlook* 2018. Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan Q4 tahun 2017, adalah sebesar Rp1.151,13 triliun dari target Rp1.283,56 triliun, atau sebesar 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp132 triliun dari target APBNP 2017. Persentase pencapaian Q4 tahun 2017 sebesar 89,68% lebih baik dibandingkan persentase capaian penerimaan pajak periode yang sama tahun 2016 sebesar 81,60% dan tahun 2015 yaitu sebesar 81,96%. Sementara itu, sampai dengan 31 Juli 2018 laju Penerimaan pajak tumbuh sebesar 14,36% atau mencapai Rp687,17 triliun (48,26% dari target APBN 2018).

Gambar 10 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2018



Sumber: LAKIN DJP 2017 dan LAPSEM I 2018 *angka sementara, realisasi per 31 Juli 2018

Bila dilihat dari capaian kinerja penerimaan pajak pada tabel 3, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 tumbuh 4,08%, lebih rendah dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun 2016 yaitu 4,25%. Namun apabila unsur Amnesti Pajak dan revaluasi aktiva tetap dikeluarkan, penerimaan tahun 2017 tumbuh 15,8% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.

Adapun rincian capaian realisasi penerimaan pajak per jenis pajak tahun 2017 beserta pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel III berikut:

Tabel 3 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2017 (Miliar Rupiah)

No	jenis pajak	Realisasi 2016	APBN-P 2017	Target Δ% 2016-2017	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2016	2017	Δ% 2015- 2016	Δ% 2016- 2017	% Penc. 2016	% Penc. 2017
A	PPh Non migas	630.113,83	742.200,00	17,79	630.113,83	596.582,30	14,02	-5,32	76,89	80,38
	1. PPh Ps 21	109.644,00	148.054,69	35,03	109.644,00	17.764,73	-4,22	7,41	84,77	79,54
	2. PPh Ps 22	11.351,86	11.064,85	-2,53	11.351,86	16.270,42	33,90	43,33	115,82	147,05
	3. PPh Ps 22 Impor	37.997,71	52.543,76	38,35	37.977,71	43.157,39	-5,67	13,64	87,26	82,14
	4. PPh Ps 23	29.142,39	36.389,83	24,87	29.142,39	34.006,42	4,52	16,69	92,50	93,45
	5. PPh Ps 25/29 OP	5.313,79	19.936,63	275,19	5.313,79	7.806,58	-35,66	46,91	18,45	39,16
	6. PPh Ps 25/29 Badan	171.596,73	242.663,59	41,42	171.596,73	208.253,14	-7,35	21,36	45,62	85,82
	7. PPh Ps 26	43.233,04	55.118,10	27,49	43.233,04	50.921,55	-10,35	17,78	79,34	92,39
	8. PPh Final	117.679,21	156.183,66	32,72	117.679,21	106.317,38	-1,66	-9,65	80,77	68,07
	9. PPh Non Migas Lainnya	104.175,06	20.244,89	-80,57	104.175,06	12.084,69	54.923,50	-88,40	49.131,78	59,69
B	PPN dan PPhBM	412.213,45	475.483,49	15,35	412.213,45	480.721,05	-2,71	16,62	86,92	101,10
	1. PPN Dalam Negeri	273.004,75	328.071,07	20,17	273.004,75	314.340,04	-2,50	15,14	85,74	95,81
	2. PPN impor	122.774,74	132.355,79	7,80	122.774,74	149.034,03	-5,65	21,39	87,28	112,60
	3. PPhBM Dalam Negeri	11.810,23	10.642,60	-9,89	11.810,23	13.292,54	27,09	12,55	112,47	124,90
	4. PPhBM Impor	4.295,39	4.077,04	-5,08	4.295,39	3.796,35	7,16	-11,62	9,13	93,12
	5. PPN/PPnBM Lainnya	328,34	336,99	2,63	328,34	258,09	19,30	-21,40	98,75	76,59
C	PBB	19.443,71	15.412,10	-20,73	19.443,71	16.771,56	-33,53	-13,74	109,79	108,82
D	Pajak Lainnya	8.104,89	8.700,00	7,34	8.104,89	6.738,47	45,55	-16,86	109,31	77,45
E	PPh Migas	36.098,56	41.770,27	15,71	36.098,56	50.316,70	-27,33	39,39	99,32	120,46
Total Non PPh Migas		1.069.875,89	1.241.795,59	16,07	1.069.875,89	1.100.813,39	5,81	2,89	81,12	88,65
Total termasuk PPh Migas		1.105.974,44	1.283.565,86	16,06	1.105.974,44	1.151.130,09	4,25	4,08	81,61	89,68

Sumber: LAKIN DJP 2017

Perkembangan Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 8,1% per tahun dalam periode 2014-2019, dengan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan mencapai 97,1%. Berikut ini perkembangan dari masing-masing penerimaan pajak dalam negeri:

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pendapatan PPh Migas

Pendapatan PPh Migas periode 2014-2017 mengalami penurunan sebesar negatif 16,8% per tahun. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan harga minyak sepanjang tahun 2015-2016. Sejak akhir tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan karena membaiknya harga *Indonesia Crude Price (ICP)*, maka ditargetkan

hingga akhir tahun 2018 menjadi pendapatan PPh Migas sebesar Rp55,4 triliun atau meningkat 45,3% dari APBN 2018.

Tabel 4 Perkembangan Pendapatan PPh Migas Tahun 2013-2018 (Triliun Rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total								
Pendapatan PPh Minyak Bumi	32	36,5	30	34,7	12,0	24,1	10,8	29,9	16,6	36,5	24,1	36,5
Pendapatan PPh Gas Alam	56,4	63,5	57,1	65,3	37,8	75,9	25,3	70,1	33,7	63,5	31,3	63,5
Jumlah	88,8	100,0	87,4	100,0	49,8	100,0	36,1	100,0	50,3	100,0	55,4	100,0
Nilai Tukar (Rp/1 US\$)	10.452,0		11.878,0		13.392,0		13.307,0		13.370,0		13.973,0	
Harga Minyak (US\$ barel/hari)	106,0		97,0		48,0		40,0		51,2		70,0	
Lifting Minyak (Ribu barel/hari)	825,0		794,0		778,0		829,0		796,9		775,0	
Lifting Gas (MBOEPD)	1.213,0		1.224,0		1.195,0		1.184,0		1.126,6		1.116,0	

Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

b. Pendapatan PPh Nonmigas

Pendapatan PPh Nonmigas meningkat sebesar 13,4% per tahun selama periode 2013-2016. Hal ini disebabkan oleh terjaganya inflasi dan semakin baiknya ekonomi domestik. Namun pendapatan Pajak Penghasilan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp480.545,1 miliar atau negatif 0,07% dibanding tahun 2016. Target PPh Nonmigas mengalami penyesuaian pada *outlook* 2018 menjadi sebesar Rp705,8 triliun atau menurun 15,8% dari APBN 2018 (tabel 5).

Tabel 5 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas Tahun 2013-2018 (Triliun Rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total								
Pendapatan PPh Pasal 21	90,2	21,6	105,7	23,0	114,5	20,7	109,6	17,4	117,8	19,7	150,5	21,3
Pendapatan PPh Pasal 22	6,8	1,6	7,3	1,6	8,5	1,5	11,4	1,8	16,2	2,7	15,6	2,2
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	36,3	8,7	39,5	8,6	40,3	7,3	38,0	6,0	43,2	7,2	52,1	7,4
Pendapatan PPh Pasal 23	22,2	5,3	25,5	5,6	27,9	5,0	29,1	4,6	34,0	5,7	39,7	5,6
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	51,5	1,2	5,6	1,2	8,3	1,5	5,3	0,8	7,8	1,3	7,3	1,0
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	154,3	36,9	148,4	32,3	183,0	33,1	169,7	26,9	206,6	34,6	230,6	32,7
Pendapatan PPh Pasal 26	31,1	7,4	39,4	8,6	42,2	7,6	36,1	5,7	43,7	7,3	49,2	7,0
Pendapatan PPh Final dan Fiskal	72,0	17,1	87,3	19,0	119,7	21,7	117,7	18,7	106,3	17,8	160,5	22,7
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	0,3	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	104,2	16,5	12,1	2,0	0,2	0,0
Jumlah	464,7	100,0	458,8	100,0	544,6	100,0	621,1	100,0	596,5	100,0	705,7	100,0

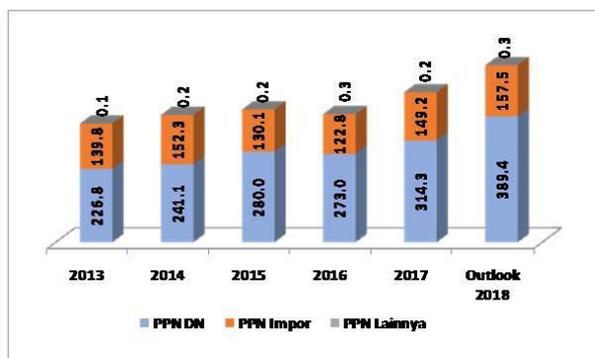
Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

c. Pendapatan PPN dan PPnBM

Tingginya pertumbuhan pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2013-2017 terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar, serta pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal termasuk Dana Desa. Rata-rata pertumbuhan sebesar 8,4% per tahun periode 2014-2018. Target realisasi PPN dan PPnBM mengalami peningkatan pada *outlook* 2018 yaitu 4,2% dari APBN 2018 menjadi sebesar Rp564,7 triliun karena terjaganya inflasi domestik sepanjang tahun 2018 (gambar 11 dan 12). Hal tersebut secara umum

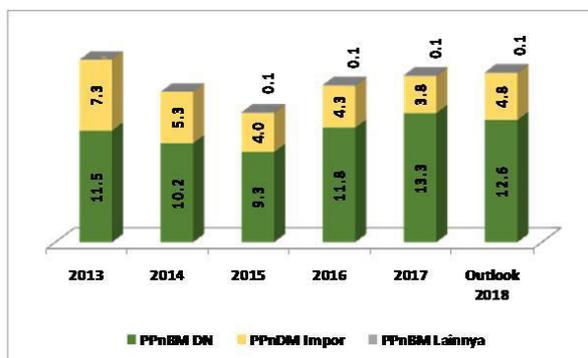
didukung oleh konsumsi dan daya beli masyarakat serta *extra effort* yang bersumber dari PPN.

Gambar 11 Pendapatan PPN



Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

Gambar 12 Pendapatan PPnBM



Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

d. Pendapatan Cukai

Perkembangan pendapatan cukai dalam periode 2013-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,2% per tahun, yaitu dari Rp108,5 triliun tahun 2013 menjadi Rp143,5 triliun pada 2016. Kontribusi pendapatan cukai, masih didominasi oleh hasil tembakau yang memberikan kontribusi sebesar 95,6%. Pajak Cukai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp795 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp143,5 triliun atau sebesar 6,83%. Tahun 2018 penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp155,5 triliun atau meningkat 1,4% dari tahun 2017.

Tabel 6 Perkembangan Pendapatan Cukai Tahun 2013-2018 (Miliar Rupiah)

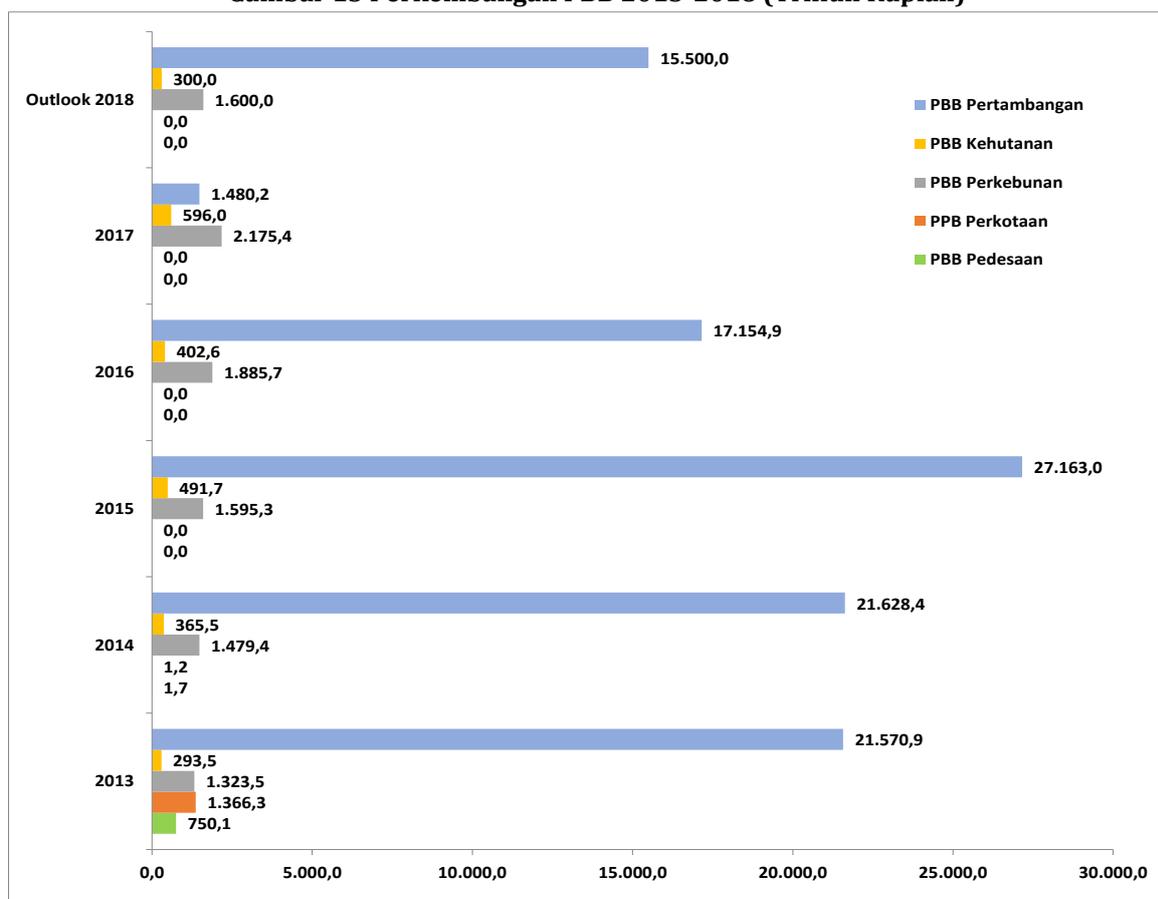
Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total						
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	103.560,2	95,5	112.544,2	95,3	139.518,2	96,5	137.968,4	96,1	147.718,2	98,7	148.300	95,4
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	159,1	0,1	166,5	0,1	154,2	0,1	171,1	0,1	147,0	0,1	200	0
Pendapatan Cukai Minuman												
Mengandung Ethyl Alkohol	4.668,2	4,3	5.342,3	4,5	4.560,4	3,2	530,7	3,7	5.567,5	0,0	6.500	4,2
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	32,5	0,0	21,8	0,0	399,0	0,3	68,4	0,0	-159,3	-0,1	0,0	0
Pendapatan Cukai Lainnya	12,1	0,0	10,9	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	12,9	0,0	500	0,3
Jumlah	108.452,1	100,0	118.085,5	100,0	144.641,3	100,0	143.525,0	100,0	149.735,2	98,7	155.500	100

Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

e. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perkembangan pendapatan PBB yang tercatat semakin menurun. Dalam periode 2013-2016 pendapatan PBB tumbuh rata-rata sebesar negatif 7,2% per tahun. Hal ini terjadi karena pengalihan pajak sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. Gambar 13 menunjukkan pendapatan PBB tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 11,15% dibandingkan periode 2016. Tahun 2018 pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp17,4 triliun atau meningkat 3,6% dari tahun 2017.

Gambar 13 Perkembangan PBB 2013-2018 (Triliun Rupiah)

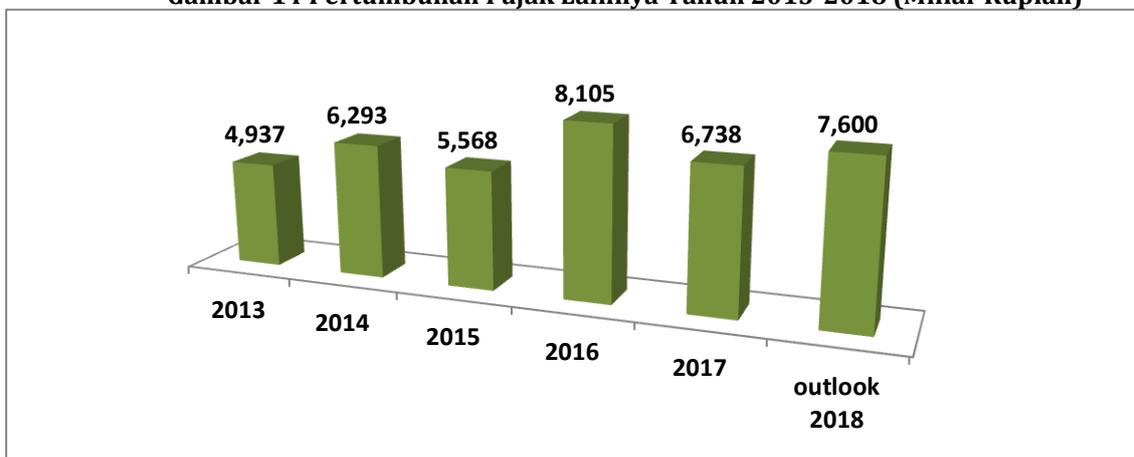


Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

f. Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya dalam periode 2013-2016 meningkat rata-rata sebesar 19,7% per tahun. Pendapatan Pajak Lainnya tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,86% dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar Rp1,4 triliun. Dalam APBN 2018, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp9,7 triliun dan dikoreksi menjadi Rp7,6 triliun pada *outlook* 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 13% dari tahun 2017 (gambar 14).

Gambar 14 Pertumbuhan Pajak Lainnya Tahun 2013-2018 (Miliar Rupiah)

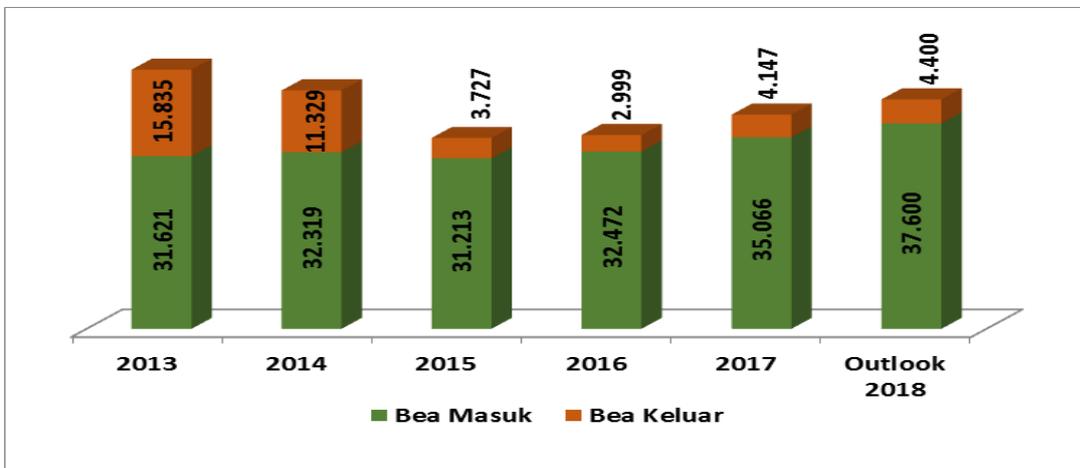


Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

Pendapatan Pajak Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional selama periode 2013-2017 menurun rata-rata 7,7% per tahun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bea keluar sebagai konsekuensi dari pemberlakuan tarif bea keluar dan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tahun 2017 lebih besar Rp3,74 triliun atau 10,55% dari tahun 2016. Peningkatan pada harga komoditas dunia yang mampu mendongkrak penerimaan pajak, hingga akhir tahun 2018 perkiraan realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp42,0 triliun atau naik 7,4% dari tahun 2017 (gambar 15).

Gambar 15 Perkembangan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 2013-2018 (Miliar Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP